

SINAU SEJARAH 'YOGYA KEMBALI'

Kembalinya Kedaulatan Bangsa Indonesia

YOGYA (KR) - Peristiwa bersejarah Yogya Kembali adalah kembalinya kedaulatan bangsa Indonesia yang di-simbolisasi dengan kembalinya Yogyakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia.

Menurut Sejarahwan UGM, Julianto Ibrahim MHum, peristiwa Yogya Kembali tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa sebelumnya, yaitu Agresi Militer Belanda II, 19 Desember 1948 dan Serangan Umum 1 Maret 1949. Pada Agresi Militer Belanda II, pasukan Belanda yang dipimpin Kolonel Van Beek berhasil menduduki Ibukota Yogyakarta.

Akibat agresi ini, lanjut Julianto, pemerintah Sukarno memberikan mandat kepada Safruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatera Barat. Pemimpin-pemimpin Republik Indonesia seperti Sukarno, Hatta dan sebagian para menteri ditawan di beberapa kota di Sumatera, seperti Muntok dan Menumbing.

Sementara itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengeluarkan Perintah Siasat No 1 yang memerintahkan seluruh pasukan TNI untuk melakukan gerilya.

Dikatakan, pada awal Februari 1949, Sultan HB IX mendengarkan radio BBC yang memberitakan akan ada sidang umum PBB yang diselenggarakan pada akhir Februari 1949.

Sultan berinisiatif mengusulkan kepada Jenderal Sudirman agar melaksanakan serangan secara serentak pada siang hari.



KR-Wawan Isnawan
Julianto Ibrahim MHum

Keberhasilan serangan ini diberitakan oleh Sersan Budihardjo melalui radio milik AURI di Playen Gunungkidul dan disebarluaskan ke seluruh dunia.

Mengetahui kekuatan TNI masih ada dan menunjukkan ketidaksetujuan rakyat Indonesia atas agresi Belanda, Dewan Keamanan PBB meminta Belanda agar bersedia berunding dengan Indonesia. Pada 10 Maret 1949, Dewan Keamanan PBB yang dimotori Amerika Serikat menekan Belanda agar bersedia berunding dengan Indonesia.

"Bahkan Amerika akan menghentikan bantuan Marshall Plan apabila Belanda tetap kukuh tidak mau berunding," kata Julianto.

Akhirnya pada 14-24 April 1949 diadakan perundingan Roem Royen yang menghasilkan keputusan, pertama Ibukota Yogyakarta harus dikembalikan kepada pemerintah RI. Kedua, pemimpin Indonesia yang ditawan agar segera dibebaskan, dan ketiga akan segera diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB). Untuk memenuhi hasil perundingan tersebut, United

Nations Commissions for Indonesia (UNCI) atau komisi PBB untuk Indonesia, membentuk sebuah lembaga bersama antara Indonesia dengan Belanda untuk mengawasi jalannya proses kembalinya Yogyakarta ke tangan pemerintah RI.

Presiden Sukarno mempercayakan Sultan HB IX selaku Menteri Negara Koordinator Keamanan untuk menjaga keamanan selama proses itu berlangsung. Proses Yogya Kembali berlangsung dari 24 Juni hingga 29 Juni 1949.

Memperingati peristiwa Yogya Kembali, Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) DIY, menyelenggarakan Sinau Sejarah Keistimewaan 'Yogya Kembali', Sabtu (29/6) pukul 09.00-12.00 di Pendapa Wiyata Praja, Kepatihan, dengan tema 'Kembalinya Kedaulatan Indonesia'.

Acara yang didanai dengan dana keistimewaan (danais) ini ditayangkan *live streaming* melalui *channel* YouTube Paniradya Kaistimewan DIY.

Sinau sejarah akan diawali pemutaran video dokumenter 'Gold History Yogya Kembali', dilanjutkan Dialog Keistimewaan 'Kembalinya Kedaulatan Indonesia' dengan narasumber Aris Eko Nugroho SP MSI (Paniradya Pati Kaistimewan DIY), Julianto Ibrahim MHum (Sejarawan UGM), dan Eko Isdianto (Ketua Komunitas Djogja '45) dipandu Cintia Rina. Acara ini juga dimeriahkan hiburan. (Wan)

GUNUNGKIDUL GEOPARK NIGHT SPECTA 6.0 DIDUKUNG DANAIS

Wahana Mengenalkan Potensi Alam Geopark



KR-Wawan Isnawan

Rembag Kaistimewan bertema 'Persiapan Gunungkidul Geopark Night Specta 6.0'.

YOGYA (KR) - Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul didukung Pemerintah Daerah DIY dan dana keistimewaan (danais) kembali menggelar event unggulan 'Gunungkidul Geopark Night Specta 6.0' di kawasan Amphitheater Nglanggeran, 28-29 Juni 2024. Menampilkan berbagai sajian menarik seperti bazar UMKM ekonomi kreatif, pentas seni tradisional, senam dan pertunjukan musik, dengan puncak acara pertunjukan gamelan orkestra 'Geoekstra'.

Kepala Dinas Pariwisata Gunungkidul, Oneng Windu Wardana SSI MSI menuturkan, event Gunungkidul Geopark Night Specta telah dimulai sejak 2016 dan sempat terhenti karena pandemi. "Tahun 2024 ini merupakan penyelenggaraan yang keenam (vol 6)," terang Windu dalam Podcast Rembag Kaistimewan bertema 'Persiapan Gunungkidul Geopark Night Specta 6.0'.

Podcast Rembag Kaistimewan diselenggarakan oleh Paniradya Kaistimewan DIY di Gedung Paniradya Kaistimewan DIY, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepatihan Danurejan Yogyakarta, Kamis (27/6) dan disiarkan *live streaming* melalui *channel* YouTube Paniradya Kaistimewan DIY. Kegiatan podcast ini didanai dengan danais.

Rembag Kaistimewan menghadirkan narasumber lain, Aris Eko Nugroho SP MSI (Paniradya Pati Kaistimewan DIY), Ike Janita Dewi SE MBA PhD (Pemerhati Pariwisata) dan Aris Budiyo (Pokdarwis Nglanggeran) dengan *host* Firman Saputra dan *co-host* Pak Radji. Acara dimeriahkan *special performance* T.S.H.A dan Mamat n' Friend.

Para peserta (Sahabat Istimewa) yang mengikuti Podcast Rembag Kaistimewan bisa mendapat *free e-sertifikat* dari Corporate University Paniradya Kaistimewan dengan mengisi *form* di kolom *chat* di *channel* YouTube Paniradya.

Menurut Windu, ruh event Gunungkidul Geopark Night Specta 6.0 adalah Geopark Gunung Sewu yang telah ditetapkan sebagai Geopark Global UNESCO, yakni suatu kawasan yang memiliki ciri-ciri geologi terkemuka, termasuk di dalamnya nilai-nilai arkeologi dan budaya. Tak ketinggalan masyarakat di sekitarnya berperan serta melindungi dan meningkatkan fungsi geopark tersebut, yaitu fungsi konservasi, edukasi dan ekonomi.

"Geopark ini bukan warisan nenek moyang tapi titipan dari nenek moyang untuk disampaikan terus ke anak cucu kita secara utuh," katanya. Lebih lanjut dikatakan Windu, tujuan utama penyelenggaraan Geopark Night Specta adalah untuk mengenalkan potensi yang ada. Di dalam Geopark Gunung Sewu ini terdapat 33 geosite yang

terbentang dari Kabupaten Pacitan, Wonogiri dan Gunungkidul. Untuk Gunungkidul memiliki 13 geosite, salah satunya Gunung Api Purba Nglanggeran. "Event Geopark Night Specta ini untuk mengenalkan/menjual produk geopark agar generasi muda lebih mengenal lagi," katanya.

Aris Eko Nugroho mengatakan, Pemda DIY ikut mendukung diselenggarakannya sebuah aktivitas/event di geopark agar masyarakat mengenalnya dan menjaga agar geopark ini tidak rusak. Jangan sampai alam yang sangat luar biasa ini menjadi rusak dan tidak diceritakan kepada generasi penerus.

"DIY adalah daerah yang menjunjung tinggi filosofi dalam hal ini Hamemayu Hayuning Bawono atau intinya berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)," katanya.

Menurut Aris, penyelenggaraan event Gunungkidul Geopark Night Specta 6.0 didanai danais dan masuk dalam urusan tata ruang. Agar geopark ini tidak hilang maka perlu diadakan aktivitas/event rutin setiap tahun. "PR kita adalah bagaimana merangkaikan event wisata dan budaya menjadi satu kesatuan, agar agenda yang telah diprediksi jauh-jauh hari diketahui oleh wisatawan secara luas, bahwa di Yogyakarta ada event unggulan," ujarnya. Sementara itu, Ike Janita

Dewi mengatakan, Geopark Night Specta sangat layak menjadi event unggulan di Gunungkidul. Di samping karena unik, juga potensi alam geopark tidak dimiliki daerah lain, sehingga bisa menjadi destinasi unggulan bahkan di level Asia Tenggara. "Gunungkidul akan dikenal secara global dengan mengangkat produk unggulannya yaitu geopark ini," ujarnya.

Ike berpesan agar event Geopark Night Specta digelar rutin setiap tahun dan masuk dalam kalender event wisata, dengan begitu para wisatawan akan berbondong-bondong datang ke Gunungkidul menyaksikan event ini. Selain itu perlu juga disiapkan paket wisata lain bersinergi dengan desa wisata yang ada. "Dengan begitu dampak ekonominya bisa meluas dan berkelanjutan," katanya.

Aris Budiyo menambahkan, Pokdarwis Nglanggeran telah terlibat sejak penyelenggaraan event pertama Geopark Night Specta bersama dinas terkait. Menurutnya, sesuai dengan namanya, Geopark Night Specta dikemas secara spektakuler dengan pemilihan venue di embung dengan latar belakang yang terbuka yaitu Gunung Api Purba Nglanggeran. "Untuk Desa Wisata Nglanggeran magnet utamanya adalah Gunung Api Purba dan terus kita branding," katanya. (Dev/Wan)

MASIH ADA POTENSI TERJADI

Praktik Politik Uang di Pilkada 2024

MAKASSAR (KR) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyatakan, praktik politik uang masih berpotensi terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024.

Sebab, berkaca data tren putusan tindak pidana pemilihan secara nasional tahun 2020 berdasarkan pasal yang dilanggar Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, tercatat ada puluhan kasus.

"Politik uang pasti selalu ada. Permasalahannya bisa direduksi atau tidak. Kita sudah patroli, begitu selesai patroli dan Panwascam kembali ke kantornya, terjadi lagi politik uang," ungkapnyanya dalam Forum Koordinasi Sentra Gaklumu di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (27/6).

Ia menyebutkan, sebanyak 65 kasus kepala desa atau pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) melanggar pasal 188, karena melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Berikutnya, 22 kasus melanggar pasal 187A ayat 1 yakni memberi dan atau men-

janjikan uang dan atau materi lainnya.

Selain itu, ada 12 kasus melanggar pasal 178B memberikan suara lebih dari sekali di satu atau lebih TPS. Kasus lainnya, 10 kasus melanggar pasal 187 ayat 3 yakni melanggar ketentuan kampanye.

Kemudian, delapan kasus melanggar pasal 187 ayat 2 ketentuan kampanye, tujuh kasus melanggar pasal 178A mengaku dirinya sebagai orang lain menggunakan hak pilih. Empat kasus melanggar pasal 185B yakni PPS, PPK, KPU provinsi, kabupaten kota tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi.

Empat kasus melanggar pasal 185B yaitu PPS, PPK, KPU provinsi, kabupaten kota tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi serta empat kasus melanggar pasal 178C ayat 2 yakni menyuruh orang lain yang tidak berhak

memilih memberikan suara di satu TPS atau lebih.

Empat kasus melanggar pasal 198A menghalangi penyelenggara pemilihan dalam menjalankan tugas, tiga kasus melanggar pasal 187A ayat 2 memilih menerima imbalan atau janji, pasal 187A ayat 4 mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye serta 19 kasus melanggar sejumlah pasal Undang-undang Pilkada.

"Kenapa panitia KPDS itu harus penduduk setempat, maksudnya untuk mengenal siapa yang akan dipilih, siapa yang memilih pada saat itu. Inilah kemudian teman-teman KPU dan Bawaslu selektif memilih penyelenggara adhoc di bawahnya, karena itu penting," jelasnya.

Selanjutnya, untuk praktik politik uang dalam hal ini pemberi dan penerima pada Pemilu 2024 hanya pemberi yang dikenakan pidana, sedangkan penerima tidak. Berbeda dengan pemilihan, pemberi dan penerima sama-sama dikenakan pidana sama halnya dengan hukum Islam. (Ant)-f

ALAT BUKTI BELUM LENGKAP

Kejati Kembali Berkas Pegi ke Polda

BANDUNG (KR) - Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengembalikan berkas acara perkara Pegi Setiawan (PS), tersangka utama kasus pembunuhan Vina, kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar. Pengembalian dilakukan karena berkas perkara dinyatakan belum lengkap.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Jabar Nur Sricahyawija di Bandung, Kamis (27/6), mengatakan, berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara PS tersebut, jaksa peneliti masih menemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. "Hasil penelitian jaksa pada tanggal 24 Juni 2024, tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penelitian belum lengkap kepada tim penyidik Polda Jabar," jelasnya.

Cahaya mengatakan, pemberitahuan ke penyidik Polda Jabar telah dilakukan pada Senin (24/6). Jaksa penuntut umum juga akan menyusun sejumlah petunjuk yang harus dilengkapi penyidik Polda Jabar. "Terkait berkas tersebut belum dikembalikan karena menurut undang-undang masih diberikan kesempatan untuk jaksa membuat petunjuk dan akan dikirimkan ke teman-teman Polda Jabar," katanya.

Diungkapkan, salah satu kekurangan berkas perkara Pegi Setiawan terkait alat bukti dan fakta berkas yang perlu dilengkapi penyidik. "Berkas masih belum lengkap. Terdapat kekurangan yang sifatnya materil dan formulir terkait alat bukti dan fakta berkas masih ada yang belum memenuhi unsur," kata Cahaya.

TIMNAS INDONESIA TAMBAH KEKUATAN

Jens Raven Resmi Jadi WNI

JAKARTA (KR) - Pemain Timnas Indonesia dipastikan bakal bertamabah kekuatannya usai Jens Ravens diambil sumpah dan janjinya. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta R Andika Dwi Prasetya memimpin pengambilan sumpah dan janji setia pewartagenerasi Indonesia kepada Jens Raven di Kantor Kemenkumham DKI Jakarta, Jalan MT Haryono Cawang Jakarta Timur, Kamis (27/6).

Andika mengatakan, kewarganegaraan memiliki peran yang vital bagi keberlangsungan sebuah negara. Oleh karena itu, hubungan antara warga negara dan negara sebagai institusi yang menaunginya memiliki aturan atau hubungan yang diatur dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Andika berharap Jens Raven bisa berkontribusi maksimal demi kemajuan sepak bola Indonesia. "Jadiilah, warga negara Indonesia (WNI) yang taat dan patuh akan aturan-aturan yang berlaku diantaranya menjaga harkat martabat bangsa Indonesia, menjaga nasionalisme, serta menjaga persatuan dan kesatuan tanah air Indonesia," ucapnya.

Setelah diambil sumpah, Jens Raven langsung melakukan pengambilan foto untuk kartu tanda penduduk (KTP). Sebelumnya, pemain sepak bo-

la Calvin Ronald Verdonk juga resmi menjadi WNI setelah mengambil sumpah dan janji setia pewartagenerasi Indonesia pada Selasa (4/6).

DPR RI telah menyetujui permohonan pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada pemain sepak bola asal Belanda Calvin Ronald Verdonk dan Jens Raven pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Jakarta, Selasa (4/6).

Ketua DPR RI Puan Maharani me-

ngatakan dalam pembahasan sebelumnya di Komisi III dan Komisi X DPR telah menyetujui proses naturalisasi kedua atlet tersebut. Persetujuan kedua atlet menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Calvin Ronald Verdonk yang berusia 27 tahun merupakan pemain di Liga Utama Belanda (Eredivisie) yang memperkuat klub NEC Nijmegen dan berposisi sebagai pemain bertahan.

(Ant/Has)-f



KR-Antara/Syaiful Hakim

Petugas mengambil foto pemain sepakbola Jens Raven untuk pembuatan KTP usai pengambilan sumpah dan janji setia pewartagenerasi Indonesia di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (27/6/2024).

Menkeu: Belanja Bansos Capai Rp 70,5 T

JAKARTA (KR) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, belanja Bantuan Sosial (Bansos) telah terealisasi sebesar Rp 70,5 triliun hingga 31 Mei 2024. "Belanja Bansos mencapai Rp 70,5 triliun, ini artinya terjadi kenaikan 12,7 persen dibandingkan Bansos tahun lalu Rp 62,5 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (27/6).

Peningkatan realisasi Bansos, menurut Menkeu, didorong oleh penyaluran Bansos Kartu Sembako periode Mei dan Juni yang disalurkan sekaligus pada Mei. Secara rinci, penyaluran Bansos yang dilakukan Kementerian Sosial mencapai Rp 37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.

Penyaluran melalui Kementerian Kesehatan tercatat Rp 19,3 triliun untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) kepada 96,8 juta peserta. Realisasi Bansos melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencapai Rp 11,9 triliun untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi

8 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 766,7 ribu mahasiswa.

Bansos melalui Kementerian Agama tercatat Rp 1,6 triliun untuk PIP bagi 1,5 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 47.000 mahasiswa. Sementara Bansos melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terealisasi Rp 100 miliar.

Secara keseluruhan, realisasi belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Mei 2024 tercatat Rp 824,3 triliun atau 33,4 persen dari pagu. Nilai itu tumbuh 15,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).

Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) tercatat Rp 388,7 triliun atau 35,6 persen dari pagu. Sementara belanja non-K/L tercatat Rp 435,6 triliun atau 31,6 persen dari pagu, yang dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

APBN pada Mei 2024 mengalami defisit 0,10 persen dengan nilai Rp 21,8 triliun. Pendapatan negara tercatat Rp 1.123,5 triliun atau melambat 7,1 persen dan belanja negara Rp 1.145,3 triliun atau tumbuh 14 persen. (Ant/San)-d